CEGAH MALADMINISTRASI, OMBUDSMAN KALTIM DAN BKKBN PERKUAT KOLABORASI

Rabu, 22 April 2026 - kaltim

SAMARINDA - Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima dan transparan, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur melakukan audiensi ke Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026).

Rombongan BKKBN Kaltim dipimpin langsung oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Kaltim, Muslimin, beserta jajaran, dan disambut hangat oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin.

Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan sinergi antara kedua lembaga, sebab Ombudsman dan BKKBN berperan dalam memastikan program kependudukan serta keluarga berencana berjalan tanpa hambatan birokrasi yang merugikan masyarakat. Poin-poin utama yang menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut antara lain pencegahan maladministrasi, optimalisasi layanan dan tata kelola publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, menekankan pentingnya langkah preventif dari setiap penyelenggara layanan. Menurutnya, pencegahan dini adalah kunci utama agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik maladministrasi.

"Perlu adanya upaya pencegahan dari penyelenggara layanan untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Tujuannya jelas, agar pengguna layanan mendapatkan layanan yang maksimal dan berkualitas," tegas Mulyadin.

Di sisi lain, Sekretaris Perwakilan BKKBN Kaltim, Muslimin, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial untuk belajar dari pakarnya pengawas pelayanan publik.

"Kami memandang perlu adanya sharing best practice terkait pelayanan publik dengan Ombudsman. Kami berharap Ombudsman berkenan memberikan pendampingan serta penguatan tata kelola pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat," ujar Muslimin.

Melalui audiensi ini, BKKBN Kaltim berkomitmen untuk terus berbenah dan mengadopsi standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh Ombudsman. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelayanan kependudukan yang lebih bersih, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas di Kalimantan Timur.